

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat

Aprillia Kinanti, Rahmadani Yusran

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Rahmadani Yusran**

E-mail: yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan berbasis nagari di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Implementasi kebijakan pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan posyandu yang dilaksanakan secara berkelanjutan, melaksanakan kegiatan kunjungan ke rumah-rumah balita serta mengadakan pelatihan kader nagari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dalam penelitian adalah Kasubid Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Nagari Kajai, Kepala Tata Usaha dan Nutritionis Puskesmas, Bidan desa dan Kader serta orang tua balita di Nagari Kajai. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pencegahan belum meningkat secara signifikan, serta tidak terjadi perubahan perilaku yang signifikan oleh masyarakat di dalam pemberian asupan gizi. Fasilitas yang kurang memadai, kurangnya pengawasan program, serta keterbatasan dana juga penyebab kurang optimalnya program tersebut.

Kata Kunci: *implementasi, kebijakan, pencegahan dan penanggulangan*

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of analyzing the implementation of village-based prevention and control policies in Nagari Kajai, West Pasaman Regency. The implementation of prevention policies is carried out through posyandu activities that are carried out on an ongoing basis, carrying out visits to the homes of toddlers and holding training for nagari cadres. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The informants in the study were the Head of the Sub-Division of Social and Community Development at the BAPPEDA of West Pasaman Regency, the Head of the Family and Nutrition Health, District Health Office, the Head of the People's Welfare Section, the Head of Administration and Nutritionist at the Nagari Kajai Public Health Center, the village midwife and cadres and other people. old toddler in Nagari Kajai. Data collection techniques by means of in-depth interviews and documentation. Based on the results of the study, it was found that the implementation of prevention and control policies in Nagari Kajai was not optimally implemented. This is due to the lack of optimal implementation of prevention and control, the level of public knowledge about prevention has not increased significantly, and there is no significant change in behavior by the community in providing nutritional intake. Inadequate facilities, lack of program supervision, and limited funds are also the causes of sub-optimality that program.

Keywords: implementation, policy, prevention and control



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2022 by author.

Received: Jul 05 2022

Revised: Agt 12 2022

Accepted: Agt 17 2022

PENDAHULUAN

Stunting merupakan permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Selama ini pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya mencegah prevalensi *stunting*. Namun demikian, jumlah prevalensi *stunting* masih meningkat setiap tahunnya. Bahkan pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan *stunting* di daerahnya masing-masing. Namun, sampai saat ini upaya pencegahan *stunting* masih belum berhasil dilakukan. Padahal dalam kebijakan pencegahan *stunting* pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pencegahan agar prevalensi *stunting* tidak terus meningkat. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengentaskan *stunting*, salah satunya seperti mengeluarkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan terhadap *stunting*, namun hal itu masih belum dapat menurunkan prevalensi *stunting* setiap tahunnya.

Di Indonesia, kasus setiap tahunnya terus meningkat, ini dibuktikan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) bahwa terjadi peningkatan prevalensi di Indonesia dari 36,8% pada tahun 2007 menjadi 37,2% pada tahun 2013, artinya 1 dari 3 anak Indonesia tergolong pendek (Riskesdas, 2013). Kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia sendiri telah diatur dalam beberapa

bentuk peraturan, yaitu seperti UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang terdapat pada pasal 141, 142 dan 143. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan.

Namun demikian, Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat prevalensi di atas rata-rata nasional, dengan Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu lokus nasional di Indonesia. Kabupaten Pasaman Barat memiliki tingkat prevalensi di atas rata-rata nasional yaitu 30,09%. Berdasarkan rekap tahunan status gizi balita pada ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) tahun 2020, diperoleh angka pada balita di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 20,5%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2019.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah dengan jumlah prevalensi *stunting* di atas rata-rata nasional dan termasuk ke dalam lokus

stunting nasional. Dalam perkembangannya, *stunting* di Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan, namun hal tersebut masih di atas rata-rata yang ditetapkan oleh WHO. *Stunting* yang tinggi di Kabupaten Pasaman Barat hampir tersebar di 11 kecamatan dan 19 nagari yang ada. Rata-rata prevalensi *stunting* di setiap nagari di atas rata-rata nasional. Salah satu nagari yang memiliki tingkat prevalensi *stunting* di atas rata-rata yaitu nagari Kajai.

Nagari Kajai memiliki prevalensi *stunting* di atas rata-rata nasional yaitu 21,39%. Nagari Kajai terdiri dari 8 (delapan) jorong yang hampir semuanya memiliki prevalensi *stunting* di atas rata-rata seperti yang terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1
Prevalensi Anak *Stunting* di Nagari Kajai

Jorong	Sasaran Pusdatin 0-59 Bulan	Sasaran Sebenarnya 0-59 Bulan	Stunting	% sasaran pusdatin	% sasaran sebenarnya
anjung Beruang	256	208	32	12,5	15,8
asa Lamo	199	146	37	18,6	25,3
imbo Batu	166	81	20	12,0	24,7
ampung Alang	142	104	25	17,6	24,0
impato	169	122	16	9,5	13,1
ubuk Sariak	95	70	20	21,1	28,6
imbo Abu	327	284	74	22,6	26,1
Audiak Simpang	226	159	42	18,6	26,4
total Puskesmas	1580	1174	266	16,8	22,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa implementasi dari peraturan bupati nomor 34 Tahun 2019 belum terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

Pertama, memfasilitasi penguatan komitmen Wali Nagari, Anggota Bamus dan masyarakat untuk mengutamakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan

pembangunan nagari. Namun demikian, fungsi memfasilitasi penguatan komitmen Wali Nagari, Anggota Bamus serta masyarakat ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini, disebabkan karena Wali Nagari, Anggota Bamus serta masyarakat belum memiliki pemahaman tentang implementasi kebijakan ini. Selain itu, sosialisasi terhadap fungsi fasilitasi ini belum dilaksanakan sesuai dengan Perbub No 34 Tahun 2019.

Kedua, memfasilitasi pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Namun, fungsi ini masih belum terlaksana. Hal ini terlihat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari beserta jajarannya tidak tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* berbasis nagari. Lokasi penelitiannya di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Sugiyono (2012) menjelaskan teknik purposive sampling merupakan cara untuk memilih informan dengan mempertimbangkan pilihan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Mempertimbangkan pilihan ini dimaksudkan bahwa seorang informan dianggap paling penting dan

mengetahui apa yang kita harapkan dan atau mereka sebagai pemimpin yang dapat mempermudah peneliti dalam mengetahui kondisi sosial di tempat yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kasubid Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA Pasaman Barat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Nagari Kajai, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Nutrisionis Puskesmas, bidan dan kader posyandu beserta orang tua balita *stunting* di Nagari Kajai.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara secara mendalam serta bukti dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yakni mengolah data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan untuk diuraikan menjadi beberapa paragraf. Kemudian data yang didapatkan dilakukan analisis secara reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan di Nagari, yang dimaksud dengan konvergensi pencegahan di nagari dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2019 adalah a) mengembangkan fasilitas konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal; b) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di Nagari untuk efektivitas fasilitas konvergensi

pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari; dan c) sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait dalam mengupayakan penyelenggaraan fasilitas konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari secara transparan dan akuntabel.

Mengacu kepada Grindle dalam (Mulyadi, 2016) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Maka dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di nagari kajai kabupaten pasaman barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Grindle (Mulyadi, 2016) implementasi kebijakan akan saling berkesinambungan dengan kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan. Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa dampak terhadap implementasinya. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari Kajai dapat dilihat dari kepentingan dari beberapa stakeholder/kelompok kepentingan yang terlibat sebagai berikut:

Pertama, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bagian penting dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasaman Barat, Bappeda memiliki fungsi dalam proses pembuatan peraturan daerah yang dinamakan dengan peraturan bupati. Sampai saat ini, dari pedoman stanasi dari tahun 2018-2024 Bappeda sudah mengeluarkan dua aturan di daerah. *Pertama*, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 mengatur tentang akksi konvergensi *stunting* di tingkat

kabupaten. Sedangkan yang kedua, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 yang lebih spesifik yaitu mengatur tentang aksi konvergensi *stunting* di tingkat nagari.

Kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Kepentingan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari Kajai adalah melakukan sosialisasi serta memberikan pelatihan maupun pembinaan terhadap pihak puskesmas maupun bidan desa serta kader posyandu dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Kegiatan pelatihan terhadap kader meliputi pemberian materi mengenai bagaimana pola asuh anak yang baik, penerapan hidup bersih dan sehat serta bagaimana cara mencegah *stunting* dengan pemberian gizi di waktu hamil. Sedangkan terhadap petugas puskesmas meliputi pelatihan kepada nakes dan nutrisionis tentang tindakan pencegahan *stunting*, adanya pelatihan petugas promkes dan sosialisasi tentang kebijakan yang menyangkut *stunting* terhadap KTU.

Ketiga, pemerintah nagari. Kepentingan pemerintahan nagari dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari Kajai yaitu sebagai pelaksana dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi serta penyuluhan maupun pelatihan mengenai pencegahan dan penanggulangan *stunting* di nagari. Dalam kegiatan sosialisasi pemerintah nagari senantiasa menyediakan ruangan di kantor wali nagari apabila kegiatan pencegahan dan

penanggulangan *stunting* dilaksanakan. Adapun dalam penyuluhan maupun pelatihan kader dengan pemberian materi mengenai bahaya *stunting* agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat yang anaknya terkena *stunting* ataupun tidak, serta ibu hamil sering dilakukan pemerintah nagari.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2016) untuk menciptakan keberhasilan dalam pengimplementasian, maka kebijakan harus dapat menciptakan kebergunaan atau dampak positif dalam pelaksanaannya. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Adapaun tipe manfaat yang dihadirkan dari implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* berbasis nagari di Nagari Kajai adalah turunnya angka *stunting* di Nagari Kajai.

Namun demikian, kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* yang dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan belum tepat sasaran dikarenakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* tidak dilakukan secara langsung di nagari lokus *stunting* seperti Nagari Kajai. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* hanya dilakukan oleh pemerintah nagari yang bekerjasama dengan puskesmas, kader dan bidan desa. Sehingga manfaat dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang anaknya terkena *stunting*. Sesuai dengan kebijakan yang ada seharusnya OPD

terkait harus datang langsung ke nagari lokus *stunting* untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan Dinas Kesehatan tidak secara langsung turun ke nagari lokus *stunting* untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Seharusnya Dinas Kesehatan secara langsung turun ke lapangan agar dapat melihat bagaimana kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Grindle (Mulyadi, 2016) setiap kebijakan akan ada target yang hendak dicapai dengan ketentuan yang jelas. Dalam sebuah implementasi kebijakan publik pasti ada sesuatu yang diharapkan, semuanya pasti ingin ada perubahan dari setiap penerapan kebijakan publik di lapangan karena dalam perubahan yang dicapai pasti ada beberapa hal yang bisa menjadi keuntungan bagi para *stakeholder* sendiri dan para masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini apakah akan memberikan dampak baik kepada kelompok sasaran atau malah sebaliknya. Tujuan dari implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* berbasis nagari ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta mendorong masyarakat untuk menerapkan pola dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah dan menurunkan angka *stunting*.

Berdasarkan temuan di lapangan, perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* berbasis nagari di Nagari Kajai adalah, *pertama* meningkatnya

tingkat pengetahuan masyarakat akan bahaya *stunting*. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* dapat berjalan secara optimal dengan tujuan agar dapat menekan angka *stunting* yang tinggi di nagari.

Kedua, menurunnya jumlah kejadian *stunting* di Nagari Kajai. Penurunan jumlah kejadian *stunting* ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak nagari, puskesmas, bidan desa serta kader posyandu kepada masyarakat secara langsung. Kegiatan sosialisasi ini berupa pemberian materi maupun anjuran kepada masyarakat agar senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta selalu memberikan asupan gizi yang sesuai untuk anak agar terhindar dari bahaya *stunting*.

Berdasarkan penjelasan di atas, derajat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* berbasis nagari di Nagari Kajai adalah menurunnya angka *stunting*. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh pihak nagari, puskesmas, bidan desa serta kader posyandu, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2 Data Kejadian *Stunting* di Nagari Kajai

Tahun	Jumlah <i>Stunting</i> (%)
2018	21,4%
2019	29,8%
2020	30%
2021	29,2%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kejadian *stunting* di Nagari Kajai meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2020, namun pada tahun 2021 jumlah kejadian *stunting*

menurun menjadi 29,2%. Dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di nagari berkaitan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta juga didukung dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak nagari, puskesmas, bidan desa serta kader posyandu seperti kegiatan sosialisasi. Namun demikian, implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* berbasis nagari belum optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari angka kejadian *stunting* di Nagari Kajai yang masih tinggi.

Sumberdaya yang memadai akan mendukung pelaksanaan kebijakan dan proses penerapannya. Namun, apabila sumber daya tidak memadai maka akan bisa menghambat proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung dengan sumberdaya yang dapat memberikan dampak positif dan berguna untuk menyukseskan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya yang memadai akan memiliki pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya yang memadai tentunya memiliki pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan optimal. Pelaksanaan kebijakan juga akan berjalan dengan baik dan lancar jika pelaksanaannya dilakukan oleh SDM yang memadai dan berkualitas.

Berdasarkan temuan penelitian penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* dinas terkait dan pemerintah nagari memiliki sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Sumber daya yang

bekerja selama ini yaitu dari dinas terkait serta dari pemerintah nagari yang bekerjasama juga dengan bidan desa dan kader posyandu di Nagari Kajai. Sumber daya manusia yang turun ke lapangan ini juga memiliki kualitas yang baik dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas.

Dalam implementasi kebijakan tidak hanya didukung oleh sumberdaya manusia tetapi juga sumberdaya fasilitas atau sarana dan prasarana serta sumber daya finansial. Namun berdasarkan temuan di lapangan terlihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari Kajai masih kekurangan sumberdaya fasilitas dan sumberdaya finansial. Hal ini dilihat dari masih minimnya fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* seperti belum adanya alat ukur otomatis untuk balita serta masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pencegahan *stunting* di nagari. Karena kurangnya dukungan sumber daya fasilitas mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Nagari Kajai.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting* berbasis nagari di Nagari Kajai masih belum optimal dilakukan. Hal ini ditandai dengan pertama, masih kurang optimalnya pelaksanaan

kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Hal ini mengakibatkan sulit tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pencegahan *stunting* belum meningkat secara signifikan. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman orang tua balita mengenai pengetahuan akan bahaya *stunting* serta akibat yang ditimbulkan oleh *stunting*, padahal kegiatan pencegahan *stunting* sering dilaksanakan di nagari. Ketiga, tidak terjadi perubahan perilaku yang dignifikan oleh masyarakat di dalam pemberian asupan gizi. Hal ini dikarenakan orang tua balita yang mengikuti kegiatan pencegahan *stunting* lebih memilih untuk bekerja sehingga yang memberikan asupan gizi kepada anak bukan orang tua yang mengikuti kegiatan pencegahan *stunting* melainkan orang lain yang tidak mengikuti kegiatan sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2016). *studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul & Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mitra. 2015. Permasalahan Anak Pendek (*Stunting*) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya *Stunting* (Suatu Kajian Kepustakaan). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Volume 2 Nomor 6.
- Latifa Suhada Nisa. 2018. Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Volume 3 Nomor 2.
- Khairu Nisa, dkk. (2019). Peningkatan Status Gizi dan Kesehatan Anak Balita Melalui Peningkatan Perilaku Sehat Ibu di Bangunrejo Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 3 Nomor 1.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Purwanto, E., & Sulistyastuti, D. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi di Indonesia)*. Jakarta: Gava Media.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Nagari.
- Moleong, & Lexy, J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.